
ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENCATATAN, PELAPORAN DAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGELOLA USAHA PERIKANAN

Agung Fitrahadi¹, Ade Nurul²,

^{1,2} IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
fitrahadiagung_elektro_ttl@yahoo.com

Received: 20-05-2023/Accepted:15-12-2023/ Doi: 10.32923/sci.v8i2.4675

ABSTRACT

Accounting recording and reporting are important things that must be done in a business with the aim of integrating the extent of the development and financial performance of the business. The problem that occurs in this research is the lack of recording and reporting processes carried out by fishery business owners which do not comply with accounting standards because they only record income and expenditure. The system for implementing profit sharing is also not based on mutual agreement, so this can trigger conditions in the business. This research uses qualitative descriptive research as a type of research that describes how fisheries businesses are implemented and the data needed to be able to make financial records according to applicable standards. The data source used in this research is primary data. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive analysis technique with a data reduction analysis process, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the research show that recording financial reports in fisheries businesses is still simple and not in accordance with standards because it only records income and expenses, but after implementing SAK EMKM in recording and reporting business finances, there are many benefits obtained by business owners. The implementation of the profit sharingsystem is also only produced by one party, where the profit sharing should be carried out based on joint decisions and agreements

Keywords: *Recording, Financial Reports, SAK EMKM, Profit Sharing, Mudharabah Agreement, Fisheries Business.*

1. Pendahuluan

Menurut pasal 232 Kompilasi Syariat Ekonomi (KHES), terdapat tiga pilar dalam akad *mudharabah*, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola (*mudharib*), dan akad (perjanjian akad). Selain itu, Pasal 236 juga menjelaskan pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal dan pengelola harus dinyatakan dengan jelas dan tepat.

Pada semua jenis usaha, pembukuan atau pencatatan akuntansi harus dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan mengelola keuangan usaha. Suatu kegiatan akuntansi atau pencatatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam jangka waktu tertentu disebut dengan siklus akuntansi. Dalam akuntansi terdapat beberapa tahapan yaitu dimulai dari pencatatan, pengelompokan akun (pengikhtisaran), pelaporan dan penafsiran. Memiliki laporan keuangan yang baik bermanfaat bagi operasional bisnis, yaitu mengetahui sejauh mana perkembangan usaha dengan meninjau laporan keuangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Masyarakat Desa Nelayan, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tidak melakukan pencatatan atau pelaporan yang spesifik mengenai modal yang diberikan dan hasil yang didapatkan sehingga dalam proses bagi hasil yang dilakukan tentunya hanya berdasarkan keputusan pihak pemilik modal saja, yang mana keputusan itu seharusnya diambil berdasarkan kesepakatan bersama atau kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, sistem pencatatan yang dilakukan masih belum kompleks sebab pencatatan hanya sebatas mencatat dengan tidak dibukukan sebagaimana mestinya. Bukan hanya itu, sistem bagi hasil yang dilakukan juga tidak menjelaskan persentase keuntungan di awal kerja sama yang akan diterima antara pemilik modal dengan pekerja (pengelola), yang mana seharusnya hal itu disampaikan secara jelas di awal akad kerjasama.

Selain itu, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti juga menemukan masalah yang terjadi yaitu adanya kekurangan dalam proses pencatatan yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur sehingga jika terjadi kesalahan dalam pencatatan maka akan mengakibatkan kerugian bagi usaha yang berjalan. Bukan hanya itu, peneliti juga menemukan masalah lain yakni dalam pelaksanaan sistem bagi hasil akad diawal kerjasama belum pasti untuk persentase keuntungan dan pengakuan terhadap kerugian yang tidak berdasarkan ketentuan, yang mana hal ini akan mengakibatkan salah satu pihak rugi.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Usaha Perikanan (Studi Kasus Desa Nelayan, Sungailiat).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Usaha Perikanan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati oleh orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan pada penelitian ini langsung menunjukkan latar dan individu yang terlibat secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak didapatkan dari prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya. Dalam penelitian kualitatif ini tentunya berkaitan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Penelitian kualitatif ini bisa diartikan sebagai jenis penelitian yang temuannya bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data pertama yang diperoleh dari informan langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara langsung pada informan penelitian ini yaitu pemilik usaha serta pengelola usaha perikanan di Desa Nelayan, Sungailiat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua penelitian ini yang diperoleh dari pihak lain yang dapat memberikan informasi tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah pencatatan transaksi usaha.

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah teknik pengumpulan data yang tepat sehingga benar-benar mendapatkan data yang valid. Jika peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif maka membutuhkan teknik-teknik kualitatif juga. Umumnya penelitian kualitatif, peneliti bisa memilih beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara (*interview*), *life history*, analisis dokumen, catatan harian peneliti, dan analisis isi media.

3. Hasil

A. Pencatatan dan Pelaporan

Laporan keuangan merupakan salah satu hal penting bagi pemilik usaha, pembisnis dan juga perusahaan. Laporan keuangan sangat terikat dan tentu banyak hal-hal penting yang terkait dengan usaha di dalamnya. Namun, hingga saat ini tidak sedikit orang yang mengabaikan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu usaha dan perkembangan usaha, yang mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan sekaligus perkembangan usaha.

Sebagai bahan evaluasi, biasanya laporan keuangan dapat menjadi acuan untuk melihat baik dan buruknya keuangan disuatu usaha dan untuk mengevaluasi kinerja usaha dalam periode tersebut. Pemilik usaha, pembisnis dan perusahaan dapat menentukan strategi selanjutnya agar lebih baik pada periode setelahnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Namun, hingga saat ini masih banyak sekali pemilik usaha, pembisnis, bahkan perusahaan yang belum mengetahui bagaimana pencatatan laporan keuangan yang baik menurut standar akuntansi. Penyusunan laporan keuangan menurut SAK EMKM terdiri dari tiga poin yang harus diperhatikan yakni laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, peneliti mendapati bahwa pencatatan yang dilakukan oleh tiga puluh pemilik usaha perikanan atau gae' semuanya sama yakni masih dilakukan secara sederhana, sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Warsella dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sudah membuat transaksi keuangan secara sederhana berdasarkan pemahaman kami.”

Dari hasil observasi dan wawancara, pemilik usaha membuat transaksi keuangan belum berdasarkan standar dikarenakan semua pemilik usaha memang belum mengetahui standar pencatatan. Hal itu dikemukakan oleh Ibu Lela selaku pemilik usaha perikanan langsung saat wawancara:

“untuk standar pencatatan keuangan kami memang belum mengetahui.”

Dari pengamatan yang peneliti dapatkan di lapangan, dari hasil wawancara yang dilakukan pada para pemilik usaha perikanan atau *gae'* mendapatkan hasil bahwa pemilik usaha perikanan atau *gae'* membuat laporan keuangan yang hanya berisikan pemasukan dan pengeluaran dari hasil usahanya. Hal itu dikemukakan oleh Ibu Hatija' selaku pemilik usaha perikanan saat wawancara:

"Selama ini pencatatan kami masih sangat sederhana, kami mencatat sebagai pengeluaran ketika kami membeli keperluan untuk usaha dan kami catat sebagai pemasukan ketika kami mendapatkan keuntungan/nisbah bagi hasil."

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaporan transaksi keuangan hanya melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran usaha saja. Laporan yang dibuat oleh pemilik usaha perikanan atau *gae'* belum ada pemisahan antara pendapatan dengan beban dalam laporan yang dibuat, sedangkan dalam SAK EMKM menjelaskan bahwa ada tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan adanya pemisah antara aset tetap, liabilitas dan ekuitas, sedangkan laporan laba rugi adanya pemisah pendapatan, beban dan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa pencatatan yang dilakukan masih belum berdasarkan standar akuntansi

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti yang sudah peneliti singgung diatas bahwa pencatatan yang dilakukan pada usaha perikanan atau *gae'* sangat sederhana yang mana pencatatan dan penyusunan laporan masih belum sesuai standar akuntansi, karena pencatatan yang dilakukan tidak menunjukkan tahap-tahap seperti yang ada pada siklus akuntansi dan pencatatannya hanya dapat dipahami oleh pemilik itu sendiri. Sehingga peneliti membuat laporan keuangan sesuai standar yang di berlakukn di Indonesia dan sesuai dengan SAK EMKM yang di dasari dari laporan keuangan yang didapat dari pemilik usaha perikanan atau *gae'*.

Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM meliputi laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan, beban usaha, pajak penghasilan dan laba rugi kotor setelah pajak, serta catatan atas laporan keuangan.

Berikut pencatatan usaha perikanan atau *gae'* yang dilakukan oleh pemilik usaha, pencatatan tersebut diambil berdasarkan informasi dari salah satu pemilik usaha perikanan dan kemudian digunakan *sample* pemilik usaha perikanan atau *Gae'* Bapak Karim bulan Desember 2023.

Tabel 1. Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Perikanan atau Gae'

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan
1	16/12/23	Beli beras	Xxx	
2		Beli kopi	Xxx	
3		Beli gula	Xxx	
4		Beli air mineral	Xxx	
5		Beli minyak goreng	Xxx	
6		Beli mie	Xxx	
7		Beli nilon	Xxx	
8		Beli rokok	Xxx	
9		Beli ladung besi	Xxx	
10		Beli pancing	Xxx	
11		Beli es	Xxx	
12		Beli solar	Xxx	
13	21/12/23	Menjual ikan hasil tangkapan		Xxx
14		Pengembalian ongkos/ransum	Xxx	
15		Keuntungan/nisbah bagi hasil		Xxx

Sumber: Data diolah, 2024.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) secara umum bertujuan untuk memberikan kerangka penyusunan laporan keuangan agar lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilik usaha perikanan atau *gae'* mengatakan bahwa mereka memang belum mengetahui tentang pelaporan transaksi keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan para pemilik usaha. Hal ini dikemukakan langsung oleh Ibu Hatija' selaku pemilik modal dalam usaha perikanan dalam wawancaranya:

"Kami memang belum mengetahui tentang adanya laporan keuangan berdasarkan standar."

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya pemilik usaha perikanan atau *gae'* memang belum mengetahui tentang adanya laporan keuangan berdasarkan standar sehingga mereka belum bisa menerapkannya karena masih minim pengetahuan teori maupun praktek. Pemilik usaha perikanan atau *gae'* hanya mencatat laporan pemasukan dan pengeluarannya saja yang disusun dengan pemahaman dan pengetahuan mereka saja. Dari data diatas,

diketahui bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan para pemilik usaha belum sesuai dengan SAK EMKM.

Adapun perbandingan pencatatan dan penyajian laporan keuangan usaha perikanan atau gae' dengan SAK EMKM.

Tabel 2. Perbandingan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Perikanan atau Gae' dengan Laporan Keuangan SAK EMKM

Keterangan	Menurut SAK EMKM	Usaha Perikanan Gae'	Kesimpulan
1. Pencatatan	a. laporan neraca b. laporan laba rugi c. CALK	Pencatatan laporan keuangan pada usaha perikanan atau gae' hanya melakukan pencatatan berdasarkan akun dari transaksi pengeluaran dan pemasukan.	usaha perikanan atau gae' tidak sesuai dengan SAK EMKM
2. Pelaporan	Laporan keuangan terdiri dari:	Laporan keuangan usaha perikanan atau gae' hanya terdiri dari pemasukan kas dan pengeluaran kas.	usaha perikanan atau gae' tidak sesuai dengan SAK EMKM
	a. Laporan posisi keuangan, terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas	a. pemasukan terdiri dari pencatatan atas transaksi penjualan ikan hasil tangkapan dan pembagian keuntungan/nisbah bagi hasil.	
	b. laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, beban usaha, pajak penghasilan, laba rugi kotor dan laba rugi bersih setelah pajak.	b. pengeluaran terdiri dari pencatatan atas pembelian kebutuhan usaha.	
	c. laporan perubahan modal terdiri dari laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas		

B. Bagi Hasil

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*mudharabah*) semua hal yang berkaitan dengan kerjasama harus disampaikan secara transparansi dan disepakati bersama agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dari hasil penelitian dan wawancara, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan para pemilik usaha perikanan atau gae' masih belum sesuai dengan ketentuan yang mana dalam pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil pihak pemilik usaha hanya menyampaikan beberapa hal saja sebagaimana rincian tabel hasil wawancara berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan atau Gae'

NO	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil	Pemilik Usaha	Jumlah Pemilik Usaha
1	Dalam pelaksanaan bagi hasil kami membeberitahu lama waktu bekerja ketika awal bekerja, keseluruhan modal kami yang	Warsella, Mariam, Saifudin	3

	tanggung/keluarkan dan untuk bagi hasil kami lakukan di akhir setelah penjualan ikan hasil tangkapan.		
2	Dalam pelaksanaan bagi hasil kami memberitahu lama waktu bekerja ketika awal bekerja, keseluruhan modal kami yang tanggung/keluarkan dan untuk bagi hasil jika tidak mengalami kerugian/tekor maka kami akan menyerahkan bagian pekerja.	Hatija', Boge', Mariati, Masruhi, Anisyah, Retalia	6
3	Dalam pelaksanaan bagi hasil akan kami lakukan ketika kami sudah menjual seluruh ikan tangkapan, kemudian kami kurangi ongkos lalu lebihnya kami bagi hasilkan.	Sampe', Sarifudin, M.Arifin	3
4	Dalam pelaksanaan bagi hasil kami memberitahu lama waktu bekerja ketika awal bekerja, keseluruhan modal kami yang tanggung/keluarkan dan untuk bagi hasil kami sesuaikan dengan tangkapan para pekerja.	Kartini, Sania, Ismail, Taufik, Amirudin, Piani, Anto, Husniati, Syarbunis, Budi, Firda, Sarmita, Armawati, Alfian, Asni.	15
5	Pelaksanaan bagi hasil kami lakukan berdasarkan keputusan kami pemilik usaha, semua modal kami yang tanggung/keluarkan dan waktu bekerja kami yang menentukan karena menyesuaikan dengan modal yang kami keluarkan.	Wati, Lela, Sudyati	3

Pemahaman pemilik usaha perikanan atau *gae'* tentang pelaksanaan sistem bagi hasil yang baik dan benar berdasarkan bagi hasil *mudharabah* masih sangat minim, hal ini disebabkan pemilik usaha perikanan atau *gae'* masih kurang pemahaman mengenai sistem bagi hasil *mudharabah*, sehingga peneliti melakukan pengarahan kepada para pemilik usaha tentang kerjasama bagi hasil *mudharabah*. Adapun perbandingan sistem bagi hasil *mudharabah* dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik usaha perikanan atau *gae'* sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* dan Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan atau *Gae'*

Keterangan	Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Bagi Hasil Usaha Perikanan/ <i>Gae'</i>	Kesimpulan
1. Akad	a. Akad harus dinyatakan secara jelas, tegas dan mudah dipahami serta dimengerti dan diterima semua pihak. b. Akad boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/Tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan UU yang berlaku.	a. Usaha perikanan atau <i>gae'</i> melakukan akad secara lisan atau ucapan tanpa ada kontrak tertulis, tetapi tidak semua hal disampaikan secara jelas ketika akad.	Usaha perikanan atau <i>gae'</i> masih belum sesuai dengan bagi hasil <i>mudharabah</i> .
2. Modal	a. Modal diserahkan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. b. Modal boleh berupa	a. Usaha perikanan atau <i>gae'</i> dalam penyerahan modal tidak dinyatakan	Usaha perikanan atau <i>gae'</i> masih belum sesuai dengan bagi hasil

	uang ataupun barang. Namun, jika modal berupa barang maka wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya. c. Modal yang diserahkan tidak boleh dalam bentuk piutang.	secara jelas berapa nilai atau nominalnya.	<i>mudharabah.</i>
3. Nisbah bagi hasil	a. Sistem/metode bagi hasil harus sesuai kesepakatan bersama. b. Nisbah bagi hasil harus disepakatai pada saat akad. c. Nisbah bagi hasil boleh diubah berdasarkan kesepakatan.	a. Usaha perikanan atau gae' dalam nisbah bagi hasil semua diatur oleh satu pihak saja yakni pemilik usaha tanpa kesepakatan pihak lainnya.	Usaha perikanan atau gae' masih belum sesuai dengan bagi hasil <i>mudharabah.</i>

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, bahwa pencatatan dan pelaporan usaha perikanan atau gae' belum sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh sebab itu, mengingat para pemilik usaha perikanan atau gae' belum menerapkan pencatatan dan pelaporan berdasarkan standar akuntansi maka peneliti melakukan sedikit pendampingan kepada para pemilik usaha dalam melakukan pencatatan dan pelaporan usaha perikanan atau gae'.

- a. Laporan posisi keuangan ini dibuat berdasarkan informasi dari Bapak Karim selaku pemilik usaha perikanan atau gae' karena data dan informasi yang disampaikan oleh Bapak Karim lebih mudah dipahami oleh peneliti. Laporan keuangan menyajikan aset, liabilitas dan ekuitas satu periode tertentu.

Tabel 5. Laporan Posisi Keuangan Usaha Perikanan atau Gae'

USAHA PERIKANAN (GAE')	
Laporan Posisi Keuangan	
ASET	
Kas	xxx
Piutang	xxx
Kapal	xxx
Mesin	xxx
Jaring	xxx
LIABILITAS	
Utang Bank	xxx
EKUITAS	
Modal	xxx

Sumber: Data diolah, 2024.

- b. Laporan laba rugi usaha perikanan atau gae' setelah menerapkan SAK EMKM adapun penjelasan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi usaha perikanan atau gae' sebagai berikut:

Tabel 6. Laporan Laba Rugi Usaha Perikanan atau Gae'

USAHA PERIKANAN (GAE')		
Laporan Laba Rugi		
PENJUALAN		
Penjualan	Xxx	
LABA KOTOR		xxx
BEBAN OPERASIONAL		
Beban nisbah bagi hasil/gaji	Xxx	
Beban perlengkapan	Xxx	
TOTAL BEBAN		xxx

LABA BERSIH		xxx
-------------	--	-----

Sumber: Data diolah, 2024

Selain itu, peneliti juga mendapatkan temuan bahwa sistem pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pemilik usaha perikanan atau gae' belum sesuai dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Oleh sebab itu, mengingat para pemilik usaha perikanan atau gae' belum mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* maka peneliti melakukan sedikit pendampingan dan menyampaikan kepada para pemilik usaha mengenai sistem bagi hasil *mudharabah* yang baik dan benar.

Setelah dilakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi dan penyampaian mengenai sistem bagi hasil yang baik dan benar ini harusnya memberikan beberapa manfaat bagi pemilik usaha diantaranya:

- pemilik usaha mengetahui bagaimana mencatat dan memproses laporan keuangan dengan standar akuntansi yang baik dan benar sehingga dapat menjadi informasi laporan yang lebih akurat dikemudian hari.
- pemilik usaha mengetahui tentang posisi keuangan mengenai penghasilan, biaya, serta laba rugi diperoleh dengan laporan laba rugi.
- pemilik usaha mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang seharusnya agar pelaksanaan bagi hasil kedepannya tidak hanya didominasi oleh salah satu pihak saja.

4. Pembahasan

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, bahwa pencatatan dan pelaporan usaha perikanan atau gae' belum sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh sebab itu, mengingat para pemilik usaha perikanan atau gae' belum menerapkan pencatatan dan pelaporan berdasarkan standar akuntansi maka peneliti melakukan sedikit pendampingan kepada para pemilik usaha dalam melakukan pencatatan dan pelaporan usaha perikanan atau gae'.

- Laporan posisi keuangan ini dibuat berdasarkan informasi dari Bapak Karim selaku pemilik usaha perikanan atau gae' karena data dan informasi yang disampaikan oleh Bapak Karim lebih mudah dipahami oleh peneliti. Laporan keuangan menyajikan aset, liabilitas dan ekuitas satu periode tertentu.

Tabel 5. Laporan Posisi Keuangan Usaha Perikanan atau Gae'

USAHA PERIKANAN (GAE')	
Laporan Posisi Keuangan	
ASET	
Kas	xxx
Piutang	xxx
Kapal	xxx
Mesin	xxx
Jaring	xxx
LIABILITAS	
Utang Bank	xxx
EKUITAS	
Modal	xxx

Sumber: Data diolah, 2024.

- Laporan laba rugi usaha perikanan atau gae' setelah menerapkan SAK EMKM adapun penjelasan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi usaha perikanan atau gae' sebagai berikut:

Tabel 6. Laporan Laba Rugi Usaha Perikanan atau Gae'

USAHA PERIKANAN (GAE')		
Laporan Laba Rugi		
PENJUALAN		
Penjualan	Xxx	
LABA KOTOR		xxx
BEBAN OPERASIONAL		
Beban nisbah bagi hasil/gaji	Xxx	
Beban perlengkapan	Xxx	
TOTAL BEBAN		xxx

Selain itu, peneliti juga mendapatkan temuan bahwa sistem pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pemilik usaha perikanan atau *gae'* belum sesuai dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Oleh sebab itu, mengingat para pemilik usaha perikanan atau *gae'* belum mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* maka peneliti melakukan sedikit pendampingan dan menyampaikan kepada para pemilik usaha mengenai sistem bagi hasil *mudharabah* yang baik dan benar.

Setelah dilakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi dan penyampaian mengenai sistem bagi hasil yang baik dan benar ini harusnya memberikan beberapa manfaat bagi pemilik usaha diantaranya:

- pemilik usaha mengetahui bagaimana mencatat dan memproses laporan keuangan dengan standar akuntansi yang baik dan benar sehingga dapat menjadi informasi laporan yang lebih akurat dikemudian hari.
- pemilik usaha mengetahui tentang posisi keuangan mengenai penghasilan, biaya, serta laba rugi diperoleh dengan laporan laba rugi.
- pemilik usaha mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang seharusnya agar pelaksanaan bagi hasil kedepannya tidak hanya didominasi oleh salah satu pihak saja.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akuntansi berupa pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pemilik usaha perikanan atau *gae'* masih sangat sederhana dan belum memenuhi standar. Usaha perikanan atau *gae'* ini hanya mempunyai catatan keuangan berupa pengeluaran dan pemasukan, sebab dalam praktik penyusunan laporan keuangannya baru dilakukan secara sederhana saja. Oleh karena itu, peneliti melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan untuk menambah wawasan serta memperkenalkan proses akuntansi pada usaha perikanan atau *gae'*. Selain itu, pelaksanaan nisbah bagi hasil yang dilakukan pada usaha perikanan atau *gae'* belum sebagaimana mestinya. Dalam usaha perikanan atau *gae'* pelaksanaan sistem nisbah bagi hasilnya hanya berdasarkan keputusan dari salah satu pihak saja, yang mana seharusnya hal itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri, Yusuf. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group Abdul, et.al (ed.). 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdullah, Fikri. 2018 “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”. Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
- Adiwarman, Azwar. 2014. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bahri, Syaiful. 2020. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. (Yogyakarta: CV Andi Offset).
- Dewi, Safitri. 2019 “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Studi Petani Balinappang Desa Botoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2010. Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2011. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariyah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Eko, Sugiarti. 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media
- Fadhilah Mursid. “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah” *Jurnal of Sharia economic Law*, Vol. 3, No. 1. 2020
- Ichwan Sam, et.al (ed.). 2014. HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARIAH Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Modul Level Dasar (CAFB) Akuntansi Keuangan*. (Jakarta Pusat: IAI) Edisi 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *SAK Standar Akuntansi Keuangan EMKM*. (Jakarta:IAI)
- Kasmir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers
- M. Burhan, Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mardawani. 2020. Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama Mohammad, Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Graha Indonesia

- Murdhaningsih, dkk. "Pencatatan Keuangan Sederhana Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Pasir, Depok" *Jurnal Masyarakat Siber*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Musyafa'ah. "Jurnal Komparatif Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP Dengan Pencatatan UMKM di Sidoarjo" *Jurnal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Rizal Darwis. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif
- Rulam, Ahmadi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Siti, Azizah. 2019 "Peran Sistem Bagi Hasil Ternak Kambing (KUBE) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". Skripsi IAIN Pekalongan
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabet
- Susilawati. 2019 "Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam". Skripsi IAIN Bengkulu
- Suwardi, Endraswara. 2006. *Metode Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemology dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Syafi'i, Antonio. 2002. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Wiratna, Sujarweni. 2019. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS
- Zhahara Yusra, dkk. "Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik COVID-19" *Journal Of Lifelong Learning*, Vol. 4, No 1., 2021
- Zulkifli, Rusby. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR